

# JURNALIS PEREMPUAN DALAM MEDIA MASSA

## (Kajian Teori Strukturasi)

Rizki Budhi Suhara  
Prodi Ilmu Komunikasi FISIP “UMC” Cirebon  
Jl. Tuparev No.70 Cirebon, Jawa Barat, 45152.  
rizki.budhi@umc.ac.id

### Abstrak

Perempuan tidak bisa dilepaskan dari semangat gerakan feminisme yang diawali oleh persepsi perihal ketimpangan posisi perempuan dibandingkan posisi pria di masyarakat. Ketentuan dalam mengatur relasi pekerja pria dan wanita berdasarkan pembagian kerja secara seksual dengan memposisikan peran gender pria sebagai kepala keluarga yang berugas mencari nafkah bagi keluarganya dan wanita sebagai anggota keluarga dengan tugas mengurus semua urusan rumah tangga. Strukturasi sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dimana masing-masing bagian dari struktur melayani satu sama lain. Teori strukturasi menjelaskan keberadaan sebuah masyarakat dengan sistem sosial yang berlaku di dalamnya, termasuk munculnya struktur dominasi yang disebabkan adanya distribusi asimetris pada sumber daya yang ada. Jurnalis perempuan merupakan individu yang melakukan pekerjaan jurnalisisme dalam suatu media massa. Citra gender yang muncul pada jurnalis-jurnalis perempuan media massa dalam realitas kehidupan sosialnya di dalam kelembagaan pers. Secara struktural arus karir dan kedudukan serta peran jurnalis perempuan menjadi marjinal dalam struktur organisasi kerja redaksional pers. Dalam produk media, perempuan dicitrakan untuk menjadi pihak yang kalah atau selalu harus melayani dan memenuhi kebutuhan laki-laki dalam relasi.

**Kata Kunci:** Media, media massa, strukturasi, jurnalis, gender, perempuan

### Abstract

*The Woman cannot be discharged from spirit of feminism movement which is early by perception as for Iameness of woman position compared to a man position in society. Provisions in arranging relationship of worker of man and woman of pursuant to division of labor sexually by positioning role of gender man as family head which berugas earn life for its family and woman as family member with the duty manage all housewifery. Structuration as process of where social structure each other being upheld by social agencies, where each part of structure serve one another. Structuration theory explain the existence a society with the social system going into effect in it, inclusive of appearance of domination structure caused the existence of unsimmetrical distribution at existing resource. Woman journalist represent the individual conducting work jurnalisme in a mass media. image Gender which emerge at journalist of woman of mass media in its social life reality in mass media institute. Structurally is career current and domicile and also role of woman journalist become the marjinal in organization chart work the redaksional mass media. In media product, image woman to become the party which fail or always have to serve and fulfill the men requirement in relationship*

**Key Word:** Media, mass media, structuration, journalist, gender, woman

## Pendahuluan

Media adalah alat komunikasi massa yang terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu media cetak (statis) dan media audio-visual (dinamis). Yang termasuk ke dalam kelompok media statis adalah bahan-bahan cetak (print) seperti buku, poster, selebaran dan sebagainya (Shoemaker, 1995). Sedangkan media audio-visual yang bersifat dinamis dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti televisi dan film. Kemunculan media massa telah menyediakan jalan bagi masuknya studi ekonomi politik media. Penelitian terkait mulai muncul pada tahun 1950an.

Industri-industri media menyediakan seluruh elemen yang dibutuhkan dalam mempelajari proses ekonomi dan politik di dalamnya. Para penyedia isi, menawarkan informasi dan hiburan, menjadi pemasok dan di sisi lain yang menjadi pembeli adalah para konsumen dan pemasang iklan. Hakikat media tidak dapat dipisahkan dari keterhubungan antara ranah publik dan privat.

Media massa menjadi perantara (*mediating*) dua wilayah ini untuk menciptakan atau menemukan kemungkinan (atau ketidakmungkinan) terciptanya hidup bersama (Shoemaker, 1995). Dalam pemahaman ini, apa yang

disebut sebagai media massa terbentang cukup luas mulai dari arena fisik seperti pengadilan, alun-alun, teater, tempat-tempat pertemuan hingga televisi, surat kabar, radio dan ruang-ruang interaksi sosial lainnya. Media memainkan peran sentral di dalam perkembangan masyarakat kita, oleh karena itulah, media kemudian menjadi terkontestasi. Media massa pada umumnya terkait dengan aspek budaya, ekonomi dan politik sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Media massa merupakan institusi sosial pembentuk definisi dan citra realitas sosial, serta ekspresi identitas yang dihayati bersama secara komunal (Sunarto, 2009).

Begitu juga apabila media massa dilihat dari aspek politik media massa memberikan ruang dan arena bagi terjadinya diskusi aneka kepentingan berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat dengan tujuan akhir untuk menciptakan pendapat umum sebagaimana yang diinginkan oleh masing-masing kelompok sosial tersebut. Dari aspek ekonomi, media massa merupakan institusi bisnis yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material bagi pendirinya.

Media massa dengan *jargon* kebebasan ternyata tidak lepas dari semangat *patriarki* yang tentunya memberikan implikasi pada kebijakan redaksional, baik disengaja atau tidak.

Bahkan media massa dengan dunia jurnalistiknya dapat dikatakan sebagai wilayah yang paling kentara memosisikan perempuan dalam konteks dikotominya dengan pria sebagai *rival*-nya. Di media massa citra perempuan terasa “meriah”, ia menyita sebagian besar produk jurnalistik, mulai dari *cover* majalah, pajangan utama infotainment, iklan televisi sampai berita-berita yang berkenaan dengan *perempuan* ataupun *perempuan berpolitik*. Media cetak, radio, televisi, film, internet dan bentuk-bentuk akhir teknologi media lainnya telah menyediakan definisi-definisi untuk menjadi laki-laki atau perempuan, membedakan status-status seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun seks.

Perempuan tidak bisa dilepaskan dari semangat gerakan feminisme yang diawali oleh persepsi perihal ketimpangan posisi perempuan dibandingkan posisi pria di masyarakat. Di mana pria digambarkan sebagai sosok yang mendominasi dan perempuan sebagai sosok yang didominasi. Gambaran tersebut akan lebih kasat mata ketika kita membedah media massa sebagai media sosialisasi nilai-nilai kultural suatu masyarakat. Perempuan akan senantiasa menarik, apalagi jika dihubungkan dengan media massa yang setiap hari kita nikmati, dari mulai media cetak yang mulai *provokatif* dan media elektronik yang semakin *atraktif*. Persoalan gender sebenarnya tersimpan di

dalam tubuh organisasi media itu sendiri. Untuk menjalani profesi yang berada di *male dominated route*, misalkan jurnalis perempuan harus dapat membuktikan kemampuan mereka tiga kali lipat daripada jurnalis laki-laki.

Di balik yang ditampilkan media massa secara dominan, ada kepentingan modal, ideologi, dan asumsi kultural yang dianut pengelola media serta masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat patriarki, ideologi dan asumsi kultural itu semuanya bertitik tolak dari pengalaman, sudut pandang, kepentingan dan nilai laki-laki (Lan, 2002:xiii). Pada level struktural, masyarakat yang diwarnai pemusatan kekuasaan oleh birokrasi negara kerap tanggapan media menjadi lebih adaptif dan akomodatif terhadap intervensi atau tekanan luar (Siregar, 1999:97). Kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak cukup hanya dengan memperjuangkan kesempatan yang sama. Kesetaraan terwujud dalam pengambilan ruang-ruang penafsiran dan penciptaan makna yang memungkinkan perempuan ikut mendefinisikan kembali peran-peran mereka.

Partisipasi dan akses perempuan mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan dalam dan melalui media memang penting. Lebih penting lagi proses pembangkitan kesadaran kritis baik kesadaran mereka yang bergerak di bidang

media massa maupun anggota masyarakat secara umum “perempuan dan laki-laki” untuk memahami dan membongkar elemen penindasan, termasuk yang bersembunyi di tatanan simbolik (Lan, 2002:35). Antropolog Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan menjadi perbincangan, karena ia di samping menjadi subyek juga menjadi obyek, di dalam dirinya, perempuan mengaktualisasikan pikiran-pikiran, kehendak-kehendak, dan tujuan hidupnya. Tetapi di lain pihak, karena wujud fisik yang dimilikinya, dia menjadi “sasaran” dari anggota masyarakat di mana ia berada. Dan posisi kedua inilah yang sering dialami perempuan. Dalam perannya sebagai obyek ini, perempuan dilihat sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan gerak dan dia berfungsi tak lebih dari sekedar pemenuh kebutuhan ekonomi, sosial, dan rohani dari anggota masyarakat

(<http://bapemaskb.surabaya.go.id/read/2010/02/16/120705-workshop-jurnalistik-graha-sawunggaling-surabaya.html>).

Seperti halnya dalam tayangan infotainment saat ini atau kita lihat *cover* majalah hampir semuanya menampilkan perempuan, dan perempuan yang dipilih harus memiliki kriteria: cantik, muda, masih lajang, kalau sudah bersuami sedang dilanda keretakan, atau menjanda, dan lain-lain yang jarang sekali berhubungan dengan kualitas pribadi yang

bersangkutan. Perempuan memang memiliki daya tarik lebih dari pria, baik sebagai pajangan sampul, pusat “gosip” atau juga sebagai nara sumber.

Di dunia jurnalistik kondisi perempuan lebih banyak terlibat dalam fungsinya sebagai *cover* dan model majalah atau sumber untuk diberitakan atau “digosipkan” daripada sebagai penuang gagasan. Kentalnya peran ini juga akan dapat terasa jika kita melihat bahasa yang digunakan media massa yang sebenarnya sangat berpengaruh pada persepsi dan cara pandang pembaca atau pemirsa terhadap sesuatu hal. Bahkan bahasa berpengaruh terhadap gerak fisik manusia yang menggunakan, lewat sugesti-sugesti yang diberikan oleh kata tertentu. Bahasa dengan “kekuatan tersembunyi” mampu melestarikan nilai dalam masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan aksi-aksi sosial berdasarkan keyakinan yang dikristalkan dengan bahasa. Maka ketika bahasa digunakan oleh media massa maka ia memiliki tanggung jawab “lebih”, karena akan dikonsumsi dan berpengaruh memperkuat *stereotype* pada pemirsa yang *heterogen*. Perspektif gender sebagai perwujudan kesadaran kritis pengelola dan pekerja media massa perlu dijalankan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kesadaran gender tidak terkait jenis seksualitas individu. Pengalaman subjektif

jurnalis perempuan mempengaruhi kelahiran karya dan kerja jurnalistik yang sensitif gender atau bahkan sebaliknya.

Melalui Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 – tentang Pers bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” dan dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik No. 3 Tahun 2006 bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Seperti yang dituangkan oleh Uni Lubis dalam Forum Jurnalis Perempuan Dewan Pers tentang “Jurnalis Perempuan Indonesia-bekerja Dua Kali Lebih Keras”

“Salah satu yang perlu diperhatikan saat membahas kaum perempuan sebagai jurnalis adalah tingkat dan standar kesejahteraan mereka sebagai karyawan. Pada APEC CEO Summit 2013 di Vladivostok, Rusia, yang diselenggarakan pada awal September lalu, sudah disusun bahan rekomendasi standar kerja untuk perempuan yang berkaitan dengan fleksibilitas tugas-tugas, fasilitas untuk anak dan lain-lain. Rekomendasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma lama yang merujuk kepada kewajiban bekerja di kantor. Dengan posisi perempuan yang merupakan tiang keluarga serta profesi jurnalis yang tidak kenal waktu, maka fleksibilitas waktu di tempat kerja merupakan suatu terobosan besar. Yuli Smartono dari Tempo menyatakan bahwa

dengan kemajuan teknologi, maka jurnalis perempuan dapat menggunakan teknologi sebagai dukungan dalam bekerja. Jurnalis dapat bekerja secara remote. Yuli menceritakan bahwa penugasannya ke daerah-daerah konflik seperti Irak, Lebanon, Vietnam, dan Sri Lanka lebih kepada alasan praktis karena saat itu ia sedang berada di luar negeri dan mudah mencapai tempat-tempat tersebut. Ia mengakui bahwa sebagai perempuan, ia baru dapat bekerja dengan cukup leluasa setelah anak-anaknya sudah besar, dan dapat ditinggalkan kepada suaminya atau keluarganya.

Dukungan keluarga, yakni dari suami maupun orang tua, juga diakui oleh Ninuk Mardiana Pambudi dari Kelompok Kompas. ia menyatakan institusi tempatnya bekerja tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan dalam memberlakukan penugasan maupun promosi. Ia menambahkan bahwa ia membuat beberapa kesalahan dalam menanggapi respon negatif dari rekan-rekan sekerjanya, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak mengambil hikmahnya dan belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada di antara kaum perempuan dan pria. Ninuk menyatakan bahwa ia dalam mempelajari kesalahannya lantas memfokuskan diri kemampuannya, sehingga berprestasi di bidang tersebut.

Pesannya kepada para jurnalis perempuan adalah wartawan bekerja tidak mengenal waktu, oleh sebab itu wanita harus bekerja dua kali lebih keras untuk dapat membuktikan dirinya sendiri.

Namun demikian, saat ini di Medan, jurnalis perempuan tetap mengalami kesulitan yang sama dengan jurnalis perempuan di daerah lain. Mereka juga mengalami diskriminasi dalam hal penugasan serta dalam hal pengembangan dan promosi karier. Rata-rata jurnalis perempuan hanya ditugaskan untuk meliput masalah domestik. Ada catatan penting tentang diskriminasi terhadap jurnalis perempuan di Medan yakni pelaku pelecehan kepada mereka rata-rata adalah aparat pemerintah. Secara tegas Khairiah Lubis meminta agar jurnalis perempuan mendapatkan pelatihan jurnalistik dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja dengan pemberian fasilitas biaya melahirkan dan biaya kesehatan. Saat ini jurnalis perempuan diperhitungkan sebagai wanita lajang sehingga tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, asuransi dan lain-lain”.

“Tidak dimaksudkan untuk meminta fasilitas berlebih, apalagi memanjakan jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan memang memiliki perbedaan secara fisik dan kodrat dibanding jurnalis pria. Tantangannya adalah menutupi perbedaan itu dengan kelebihan jurnalis perempuan, misalnya soal ketelitian, ketekunan, kemampuan riset dan mendapatkan sudut pandang pemberitaan yang lebih berpihak pada isu kemanusiaan

dan sosial kemasyarakatan, tutur Uni Lubis.

<http://unilubis.com/2015/03/10/jurnalis-perempuan-indonesia-bekerja-dua-kali-lebih-keras/html>)

## Hasil dan Pembahasan

Yang digunakan media massa ketika menulis tentang perempuan seakan-akan ia sedang menulis sebuah obyek yang hanya dilihat secara kasat mata seputar fisik, keelokan tubuh, ukuran sepatu, ukuran pinggang - dada - pinggul, dan hal-hal lain yang tidak penting untuk di-*ekspose* ke publik. Kenyataan ini akan lebih transparan apabila kita menonton tayangan infotainment atau membaca *yellow paper* (koran kuning) yang kebanyakan “mengeksplorasi” perempuan untuk sebuah kepentingan yang namanya *rating* (untuk acara televisi) dan *tiras* (untuk media cetak). Media massa memiliki kontribusi besar dalam proses konstruksi realitas pada tataran individu. Tampilan media sesungguhnya adalah realitas simbolik hasil karya pekerja media yang dipengaruhi oleh latar belakangnya, realitas simbolik yang ditampilkan ini dimaknai sebagai realitas sesungguhnya oleh audiens. Realitas yang disajikan media menjadi rujukan individu dalam proses diri individu membangun identitas dirinya. Bagi audiens realitas yang dibangun media adalah fakta, dunia objektif. Individu tidak punya daya untuk

mengubah dan campur tangan, bahkan individu secara sadar memahami dan menerimanya sebagai sebuah realitas.

Menurut Sunarto (2009:4) bahwa wanita oleh media massa, baik melalui iklan atau berita, senantiasa digambarkan sangat tipikal yaitu tempatnya ada di rumah, berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, tidak mampu membuat keputusan penting, menjalani profesi yang terbatas, selalu melihat pada dirinya sendiri, sebagai objek seksual/ simbol seks (*pornographizing; sexploitation*), objek *fetish*, objek peneguhan pola kerja patriarki, objek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan (*blaming the victim*) dan bersikap pasif, serta menjalankan fungsi sebagai pengonsumsi barang atau jasa dan sebagai alat pembujuk.

Masyarakat muncul pandangan bahwa perempuan adalah objek seks yang fungsi utamanya di dunia, adalah untuk melayani pria. Karena dicitrakan sebagai objek seks, persepsi bahwa perempuan harus tampil dan berperilaku sebagai objek seks adalah suatu keharusan. Perempuan harus tampil dengan menonjolkan daya tarik seksual, harus bersedia mengalami pelecehan seksual dan harus memaklumi perilaku seksual agresif pria.

## **Gender**

Haralambos dan Holborn, Giddens (dalam Sunarto, 2009:33) dimana istilah gender mempunyai konotasi psikologis, sosial, dan kultural yang membedakan antara pria dan wanita dalam menjalankan peran-peran maskulinitas dan feminitas tertentu di masyarakat. Sedangkan feminisme diartikan sebagai sebuah teori politik atau sebuah praktik politik yang berjuang untuk membebaskan semua kaum wanita, seperti wanita kulit berwarna, wanita miskin, wanita cacat, lesbian, wanita lansia, dan wanita heteroseksual kulit putih secara ekonomi (Chodorow, Bhavnani dalam Richardson dan Robinson (dalam Sunarto, 2009:33). Menurut Landes (1995) bahwa perempuan yang seringkali lebih terkait dengan urusan-urusan domestik (kerumahtanggaan) berbicara tentang hal-hal yang berbeda dengan laki-laki karena mempunyai ketertarikan pada bidang yang berbeda.

Pandangan Stacey (1993) dalam memahami keterpurukan wanita mencakup empat isu utama:

1. Patriarki
2. Subordinasi wanita
3. Kategori wanita
4. Implikasi ideologis dari teori feminis

Diformulasikan oleh Sunarto (2009:33) dari ke empat isu utama tersebut diuraikan bahwa:

1. Penindasan sistematis terhadap wanita disebabkan oleh struktur kemasyarakatan yang memberi kekuasaan lebih kepada kaum pria sehingga mereka menjadi *patriarch* yang mendominasi kaum wanita.
2. Bagaimana patriarki melakukan kontrol terhadap kaum wanita, secara universal pada semua wanita atau secara khusus pada kaum wanita tertentu dari suatu budaya tertentu berdasarkan etnisitas, rasialitas, nasionalitas, kelas dan seksualitas mereka
3. Berusaha untuk menunjukkan akan beragamnya makna wanita sesuai dengan waktu, tempat dan konteksnya
4. Lebih mempersoalkan perspektif teoritis yang didasarkan pada aspek alamiah wanita (*essentialism*) atau aspek sosialnya (*social constructionism*)

Krishnan dan Dighe (dalam Barker, 2005:329) memaparkan bagian dua sisi perempuan menjadi yang diidamkan dan menyimpang. Perempuan yang diidamkan adalah perempuan ideal dimana perempuan yang penyayang dan keibuan, mendukung ambisi lelaki tapi tak punya ambisi untuk dirinya sendiri, berkorban, empatik, dan terpaku pada rumah. Perempuan menerima kontrol laki-laki dan mengabdikan pada para lelaki dalam hidup mereka, bahkan membela suami dan tanpa sanggahan. Perempuan yang menyimpang adalah mereka yang mendominasi suaminya dan tidak berada di rumah untuk mengurus keluarga. Karena ambisi-ambisi pribadinya, mereka memutuskan hubungan dengan keluarga, merusak keterikatan laki-laki, dan tidak cukup pengertian. Beberapa atribut yang paling umum digunakan untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan:

<b>Karakter Laki-Laki</b>	<b>Karakter Perempuan</b>
Egois	Mengorbankan diri
Memutuskan	Tergantung
Percaya diri	Ingin memuaskan orang lain
Mencari tempat di dunia yang lebih luas	Mendefinisikan dunia melalui hubungan keluarga
Rasional dan manipulatif	Emosional dan sentimental
Dominan	Subordinat
Paternal	Maternal/ keibuan

Sumber: Dikutip dari Krishnan dan Dighe (dalam Barker, 2005:330)

Ketentuan dalam mengatur relasi pekerja pria dan wanita berdasarkan pembagian kerja secara seksual dengan

memposisikan peran gender pria sebagai kepala keluarga yang berugas mencari nafkah bagi keluarganya dan wanita sebagai anggota keluarga dengan tugas mengurus semua urusan rumah tangga. Menurut Sunarto (2009:199) juga menjelaskan bahwa dalam praktek sosial yang berlangsung di masyarakat sebagaimana ditunjukkan melalui UU No.1 Tahun 1974 – tentang Perkawinan bahwa “Yang menentukan peran sosial berbeda bagi pria dan wanita. Pria berperan sebagai suami dan kepala

keluarga dengan tugas untuk menghidupi dan melindungi anggota keluarganya. Sedangkan wanita berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan tugas mengurus semua urusan rumah tangga.

Dua pendekatan dalam jurnalisme (Subono, 2000: 60-64):

1. Netral atau objektif
2. Perspektif gender

Pendekatan jurnalisme netral dan perspektif gender dilihat dari posisi media dan posisi jurnalis.

**a. Posisi Media**

<b>Jurnalisme Netral</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Gender</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media adalah sarana yang di dalamnya semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral dan setara</li> <li>2. Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adanya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan (patriarki) maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang marjinal, khususnya perempuan</li> <li>2. Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender</li> </ol>

**b. Posisi Jurnalis**

<b>Jurnalisme Netral</b>	<b>Jurnalisme Berperspektif Gender</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai atau ideologi jurnalis berada d ‘luar’ proses peliputan atau pelaporan berita</li> <li>2. Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang nonpartisan</li> <li>3. Landasan moral (etis)</li> <li>4. Profesionalisme sebagai keuntungan</li> <li>5. Tujuan peliputan dan penulisan pemaparan dan penjelasan apa adanya</li> <li>6. Jurnalis sebagai bagian tim untuk mencari kebenaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan peristiwa</li> <li>2. Jurnalis memiliki peran sebagai pegiat atau peserta kelompok-kelompok marjinal, khususnya perempuan yang ada dalam masyarakat</li> <li>3. Landasan ideologis</li> <li>4. Profesionalisme sebagai kontrol</li> <li>5. Tujuan peliputan dan penulisan pemihakan dan pemberdayaan atas</li> </ol>

	kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan
	6. Jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas-kelas sosial

Sumber: Dikutip dari Eriyanto (dalam Subono, 2000:61-64)

## Strukturasi

Pelaku adalah orang-orang yang kongkrit dalam arus berkelanjutan tindakan dan peristiwa di dunia. Adapun struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktek sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak pada proses yang di dalamnya, struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktek sosial. Dualitas terletak pada fakta bahwa suatu ‘struktur mirip pedoman’ yang menjadi prinsip praktek-praktek di pelbagai tempat dan waktu, itu merupakan hasil perulangan pelbagai tindakan kita. Dalam strukturasi Giddens, istilah kekuasaan (*power*) harus dibedakan dari istilah dominasi. Kekuasaan adalah kapasitas yang melekat pada pelaku. Kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif (Priyono, 2002:33). Karena kekuasaan merupakan kapasitas yang melekat pada pelaku, tidak pernah mungkin terjadi penguasaan total atas orang lain. Giddens menamakannya sebagai ‘dialektika kontrol’ (Priyono, 2002:35). Artinya, dalam penguasaan selalu terlibat relasi

otonomi dan kebergantungan, baik pada yang menguasai maupun pada yang dikuasai.

Strukturasi melalui agen sosial, individual, aktor, yang dikenal sebagai arti proses sosial dari individu. Konsep tersebut bermaksud pada praktek dalam mendefinisikan kembali aktor-aktor sosial, kapital, serta buruh, sebagai subyek individu yang mana memiliki nilai yang berhubungan dengan hak-hak individu, ekspresi individu, serta hak politik individu dalam pengambilan suara, dan hak-hak individu untuk berkonsumsi. Tindakan-tindakan ini diambil atas nama negara, tapi terikat dengan aturan-aturan kelas, memisahkan individu yang satu dengan lainnya, dari identitas sosial mereka. Oleh karena itu, strukturasi merupakan suatu catatan data untuk meneliti konstitusi yang bermutu dari struktur serta *agency* dalam ekonomi politik. Hal ini merupakan suatu permulaan untuk memperluas konsepsi kekuasaan dan pengertian mengenai bentuk hubungan sosial yang ada dalam ekonomi politik. Strukturasi menjelaskan tentang relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial.

Berdasarkan teori strukturasi Vincent Mosco (2009) melihat bahwa baik struktur maupun agen memiliki peran yang sama penting dalam menentukan sistem komunikasi. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antara masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Mosco melihat strukturasi sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dimana masing-masing bagian dari struktur melayani satu sama lain. *Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain.* Media sebagai institusi ekonomi dan politik, yang sekarang kurang memperhatikan kepentingan publik tetapi lebih mementingkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan positif dan negatif pemberitaan dan informasi yang dicerna masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan Mosco juga terdapat tiga *entry point* untuk masuk kedalam ekonomi politik pada kajian komunikasi: komodifikasi (*commodification*); spasialisasi (*spatialization*); dan strukturasi (*structuration*).

Menurut Mosco (2009), dalam teori strukturasi mengacu pada individu-individu sebagai aktor-aktor sosial yang perilakunya dibentuk oleh matriks dari

posisi dan relasi sosial mereka yang melibatkan kelas, ras dan gender. Meskipun strukturasi mengarahkan agen-agen sebagai sosial, bukan individual, teori strukturasi mengakui akan arti penting proses sosial dari individual. Karenanya strukturasi menjadi sebuah jalan masuk untuk meneliti pembentukan struktur dan agensi secara bersama-sama dalam ekonomi politik. Perspektif strukturasi mencoba untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam perspektif struktural dan tindakan sosial. Teori strukturasi hadir untuk menjelaskan keberadaan sebuah masyarakat dengan sistem sosial yang berlaku di dalamnya, termasuk munculnya struktur dominasi yang disebabkan adanya distribusi asimetris pada sumber daya yang ada. Sebagai entitas kultural, industri televisi tampaknya dipenuhi dengan kepentingan praktis. Hal ini disebabkan kemampuan media televisi menjadikan dirinya sebagai media interaksi antara produsen acara dengan khalayak pemirsanya melalui tanda visual, audio, verbal.

Karakteristik terpenting dalam teori strukturasi adalah melihat perubahan sosial sebagai sebuah proses yang ada dimana-mana yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium dari struktur tersebut. Teori ini memberi keseimbangan pada

kecenderungan ekonomi politik pada aspek-aspek institusi bisnis dan pemerintahan dengan mengarahkan dan menggabungkan gagasan mengenai agensi, relasi sosial, proses sosial, dan praktek sosial. Karenanya strukturasi menjadi sebuah jalan masuk untuk meneliti pembentukan struktur dan agensi secara bersama-sama dalam ekonomi politik (Sunarto, 2009:19).

### **Jurnalis Perempuan Dalam Media Massa**

Para pengelola media massa ini melihat perempuan hanya sebatas barang dagangan, objek seksual, dan pemuas laki-laki. Realitas ini semakin mempertegas asumsi tentang rendahnya kesadaran gender para pengelola media massa. Media massa berperan dalam memperkuat dan melanggengkan ketidakadilan gender di masyarakat. Mencermati hal tersebut, peran media massa pada tataran individu dalam menanamkan ideologi tidak bisa dibantah. Sementara itu, di satu sisi pengelola media massa selalu berada pada posisi bahwa mereka menyajikan seperti yang diinginkan oleh audiensinya. Padahal, tidak selalu media massa itu seperti yang dibutuhkan oleh audiensi, mengingat peran komunikator (pengelola dan pekerja media massa) dalam mengemas dan memilih informasi yang akan disajikan sangatlah besar. Media

massa sebenarnya sangat ditentukan oleh pengelola dan pekerja media massa. Orientasi pada kebutuhan pembaca sebenarnya memiliki kontribusi yang tidak berarti. Dengan kata lain, peran komunikator dalam memproduksi pesan sangat dominan dan ini bisa dilihat pula dari media massa yang lebih banyak memuat kekerasan dan ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender.

Informasi yang disajikan dalam produk media juga mencitrakan relasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi ini dengan menggunakan kerangka analisis gender bisa pula menunjukkan pemahaman dan perspektif gender komunikator pembuat produk media tersebut. Pemahaman gender para pekerja media massa ini pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural. Mereka tidak pernah memilih kondisi sosio-kultural yang akan mereka pakai. Mereka tumbuh dan berkembang lewat belajar dari pengalaman dan kemudian memberikan arti pengalaman tersebut ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam proses penyesuaian diri terhadap berbagai pengalaman, kondisi sosio-kultural berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, kondisi sosio-kultural bukan sesuatu yang diberikan kepada profesional media massa melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang melalui proses interpretasi dan

reinterpretasi terhadap berbagai perkembangan dalam kehidupan mereka.

### **Di Balik Dapur Jurnalis Perempuan**

Dengan demikian, insan media massa terpengaruh oleh kepercayaan mereka dalam mempersepsikan hasil penelitian tentang perlakuan pers Indonesia pada perempuan, bisa positif (menggarapnya sebagai satu fakta yang ada di lingkungan kerja mereka) atau bisa negatif (mempersepsi hal ini tidak terjadi). Hal ini sangat manusiawi. Bagaimanapun, pekerja media itu hidup dalam sebuah sistem sosial yang memiliki sistem makna tersendiri. Yang bisa dilakukan adalah merekonstruksikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender ke dalam sistem sosial masyarakat tempat pekerja media massa itu hidup. Pandangan etis semacam ini tentunya sangat signifikan dengan tujuan jurnalisme yang dianut oleh media yang bersangkutan. Para pekerja wanita melihat adanya penindasan terhadap kaum mereka dalam masyarakat akan tetapi, tidak tahu mengenai bagaimana memberikan solusi atas tindakan represi tersebut (Sunarto, 2009:179).

Ketimpangan gender dalam media massa, pada dasarnya merupakan cermin dan refleksi dari kondisi sosial budaya masyarakat. Jika jurnalisme berperspektif gender menyangkut permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja menyangkut

keseluruhan kerja jurnalisme dan unsur-unsur jurnalistik, namun juga lingkungan masyarakat. Gender dalam dunia pers dapat dilihat dari 4 sisi:

1. Minimnya jumlah perempuan jurnalis, terbatasnya peran serta tumbuh suburnya stigma patriarki di antara para jurnalis laki-laki di dunia pers Indonesia
2. Rendahnya kualitas pemberitaan berperspektif gender
3. Diperlukannya sebuah pola dan gaya jurnalisme berperspektif gender
4. Munculnya bias gender dalam manajemen yang terwujud dalam kebijakan keredaksian yang dianutnya

Secara konseptual, tujuan jurnalisme diwujudkan dalam kebijakan redaksional media tersebut. Hanya saja, secara kontekstual, upaya untuk mendiseminasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan redaksional ini terkalahkan oleh ideologi kapitalisme. Laki-laki yang diuntungkan oleh ideologi patriarka telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama melestarikan struktur hubungan gender yang timpang. Pelestarian ketimpangan hubungan itu tidak hanya menyebabkan perempuan semakin ter subordinasi, tetapi juga menyebabkan terjadinya subordinasi perempuan oleh perempuan sendiri. Hal ini

tampak dari posisi yang ditempati perempuan dalam iklan, di satu sisi perempuan merupakan alat persuasi di dalam menegaskan citra sebuah produk dan di sisi lain perempuan merupakan konsumen yang mengonsumsi produk kapitalisme (Fairclough, 1995:208). Perempuan sesungguhnya merupakan produk dari kehidupan sosial tersebut sehingga ia ter subordinasi oleh kepentingan-kepentingan dan harapan umum yang ingin melihat perempuan sebagai objek. Perempuan sesungguhnya tidak mempunyai kesempatan untuk memilih karena pilihan-pilihan selalu ditentukan sebelumnya dengan

kemungkinan-kemungkinan yang lebih menguntungkan pihak lain.

Dari tahun 1978 sampai 1991 perimbangan pekerja pers masih jalan di tempat (Priyo, 1999:127). Tahun 1993, dari 775 wartawan perempuan sebanyak 38,4 % nya bekerja di surat kabar. Berarti bahwa wartawan perempuan selebihnya bekerja sebagai wartawan di bidang lain seperti majalah, penerbitan khusus, dan juga televisi. Mengetengahkan jumlah pekerja pers televisi, yang mencakup di dalamnya imbalanced komposisi jumlah kameramen dan reporter perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Jumlah kameramen dan reporter televisi swasta di Indonesia:

Jenis Pekerjaan	SCTV	RCTI	ANTV	INDOSIAR	TPI	Jumlah
Reporter laki-laki	38	42	34	16	22	152
Reporter perempuan	15	20	14	8	12	70
Kameramen laki-laki	34	32	30	26	20	142
Kameramen perempuan	-	-	-	-	-	-
Presenter laki-laki	6*	8	2*	2*	4*	24*
Presenter perempuan	7*	6*	5*	2*	5*	25*
	100	108	85	84	64	413

Keterangan: \*) merangkap reporter

Sumber: Dikutip dari *Wacana Gender dan Layar Televisi* (Priyo, 1999:127)

Data terbaru menyajikan proporsi yang tidak jauh beda dengan data-data sebelumnya. Perbandingan antara jurnalis perempuan dengan jurnalis laki-laki

berbanding sekitar 1:2. Praktek sosial dengan distribusi kekuasaan formal (struktur organisasi) masih menunjukkan banyak posisi strategis yang dikuasai oleh karyawan laki-laki. Komposisi seluruh

jajaran pimpinan di stasiun televisi ini di tempati oleh lebih banyak pekerja laki-laki dibandingkan pekerja perempuan.

Pengamatan dalam komposisi karyawan di stasiun televisi:

Level	Seks		Jumlah
	Pria	Wanita	
Director	3	2	5 (0.3)
Division Head	5	1	6 (0.4)
Departement Head	25	7	32 (2.0)
Section Head	52	14	66 (4.2)
Producer	33	13	46 (2.9)
Officer	1225	204	1429 (90.2)
Jumlah	1343 (84.8)	241 (15.2)	1584 (100.0)

Sumber: Dikutip dari Departemen SDM Stasiun Televisi (dalam Sunarto, 2009:172)

Menurut Abdulah (dalam Naomi, 2003:104) sampai saat ini Indonesia belum memiliki kuantitas jurnalis perempuan dibanding jurnalis laki-laki. Data dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tahun 1994 menunjukkan bahwa jumlah wartawan perempuan 8,5 % sedangkan wartawan laki-laki 91,4 %. Data PWI saat ini pun dalam periode September 2003 hanya mengalami kenaikan sedikit dalam hal kuantitas jurnalis perempuan yaitu dari jumlah total 10.278 wartawan, jumlah wartawan laki-laki sebanyak 9.119 (89,5 %) sedangkan wartawan perempuan sebanyak 1.079 (10,5 %).

Struktur organisasi yang lebih didominasi oleh karyawan laki-laki ini dijumpai perilaku karyawan laki-laki yang tidak menyenangkan bagi karyawan perempuan. Seperti adanya pelecehan seksual atau diskriminasi jabatan. Dalam dunia televisi interaksi antar pekerja perempuan dan laki-laki berlangsung penuh keterbukaan dan keakraban satu sama lain sebagai anggota dari sebuah keluarga besar dan sekaligus tim kerja. Sistem organisasi yang tidak memperlakukan pekerja perempuan berbeda dengan pekerja laki-laki menjadikan suasana kompetisi berlangsung secara dinamis. Bahkan dalam kenyataannya masih banyak posisi pimpinan yang diduduki pekerja laki-laki bukan merupakan faktor penghalang bagi pekerja perempuan untuk terus maju. Iklim organisasi yang berkembang dalam industri televisi didominasi oleh nilai-nilai yang bersifat maskulin sehingga mengukuhkan keberadaan industri media televisi sebagai situs laki-laki. Dalam dunia seperti ini tampaknya semua pekerja menjadi ‘laki-laki’ semua. Dalam posisi sebagai perempuan, mereka menyadari adanya perlakuan tidak adil terhadap kaum wanita yang masih hidup dan berkembang di masyarakat kita. Menurut Sunarto (2009:175) ada beberapa tipe pekerja perempuan di stasiun televisi:

1. Tipe pekerja keras

2. Tipe penyeimbang
3. Tipe feodal atau pengabdian

Media dari segi institusi melihat bahwa dalam organisasi seringkali terjadi ketimpangan gender karena adanya nilai-nilai kapitalis dan nilai-nilai patriarka yang saling menguntungkan. Meski secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terjun di industri media, tidak menghilangkan fakta tentang adanya kecenderungan sikap stereotipe, diskriminatif, bahkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam struktur organisasi kerja media. Oleh karena itu, perlunya melihat dinamika hubungan nilai-nilai patriarka dan nilai-nilai kapitalis dalam menganalisis kehidupan organisasi, dalam hal ini organisasi/ institusi media. Pada dasarnya, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan respons seksual.

Perilaku seksual masing-masing dikendalikan oleh konstruksi sosial nilai-nilai budaya yang dianut. Masyarakat sering menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban untuk melayani hasrat seksual laki-laki. Atas dasar ini tampak bahwa tindakan seksual di antara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter.

Respons seksual perempuan tidaklah ditanggapi oleh laki-laki dan diamnya perempuan atas perlakuan pelecehan seksual yang diterimanya, dianggap sebagai undangan atau pernyataan setuju. Perlu juga dicermati bahwa perbedaan atau persamaan status antar pasangan merupakan peran dalam distribusi atau akumulasi kekuasaan. Seseorang yang superior (laki-laki) akan menentukan dan mempengaruhi tindakan seksual sebuah pasangan.

Gender yang dialami para jurnalis perempuan saat ini, media memang mulai memperbanyak jumlah jurnalis perempuan. Hanya saja itu merupakan taktis, karena jurnalis perempuan banyak digunakan oleh media sebagai siasat untuk 'mendekati' narasumber laki-laki. Jurnalis yang lebih banyak direkrut saat ini pun harus memiliki wajah yang rupawan dan tubuh yang dianggap menarik oleh standar industri media. Penilaian secara fisik untuk jurnalis perempuan ini khususnya terjadi di industri media televisi. Setelah berkeluarga, jurnalis perempuan kerap mengalami hambatan karirnya. Selain harus bekerja, jurnalis perempuan juga memiliki kewajiban untuk mengasuh anak. Sistem kerja di media yang tak mengenal waktu, kerap menjadi hambatan. Dampaknya banyak jurnalis perempuan yang memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Adapula jurnalis perempuan yang memilih bekerja secara *freelance* agar lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Namun kondisi ini tidak menimpa pada jurnalis laki-laki.

Upah yang diterima jurnalis perempuan lebih kecil jika dibandingkan dengan jurnalis laki-laki. Ini dikarenakan perusahaan media masih menganggap jurnalis perempuan bukan

sebagai kepala rumah tangga. Jurnalis perempuanpun ada yang tidak mendapatkan asuransi. Di beberapa media, jurnalis perempuan yang melahirkan tidak mendapat penggantian biaya persalinan. Karena menganggap, kantor suaminya yang bertanggung jawab untuk mendapat penggantian ini. Ini tentu tidak adil bagi jurnalis perempuan. Menyusui yang menjadi hak pekerja perempuan terkadang tidak terpenuhi. Jurnalis perempuan masih jarang yang dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya. Ini juga dikarenakan di perkantoran media tidak menyediakan ruang khusus bagi jurnalis perempuan yang menyusui. Jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan seksual pada saat melakukan peliputan. Bentuk pelecehan tersebut beberapa kali dilakukan oleh nara sumber laki-laki, yaitu dengan melakukan tindakan meraba-raba dan memegang bagian tubuhnya.

### **Media dan Jurnalis Perempuan**

Dalam kaitannya dengan perempuan pada industri pers, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang mewarisi nilai-nilai domestik seperti sekretaris redaksi, staf administrasi kantor. Stigma pewarisan nilai tersebut pun masih melingkupi manajemen keredaksian. Sehingga walaupun seorang jurnalis perempuan ditugaskan untuk melakukan reporting, lebih sering ditempatkan pada bidang-bidang yang bersinggungan dengan masalah domestik ataupun tempat-tempat yang dalam pertimbangan manajemen tak beresiko tinggi. *Desk* yang mengurus masalah-masalah domestik, seperti perawatan keluarga, kesehatan atau bidang publik tetapi dengan substansi domestik gaya hidup dan mode akhirnya dianggap sebagai 'hak' dan 'tempat' nya kaum perempuan. Sementara *desk-desk* seperti ekonomi, politik, hukum, dan kriminal serta pertahanan dan keamanan yang lebih substansi publik diserahkan ke laki-laki. Kalangan jurnalis perempuan sendiri menganggap pembagian *desk* seperti itu tidaklah adil. Sebaiknya diberi keleluasaan tidak dibagi-bagi menurut sektor-sektor tersebut. Citra genderpun akhirnya muncul pada jurnalis-jurnalis perempuan media elektronik dalam realitas kehidupan sosialnya di dalam kelembagaan pers. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang cenderung memanfaatkan fisik lebih, seperti kameramen, tugas reporting di malam hari, lebih diprioritaskan hanya pada jurnalis laki-laki.

Kompas sebagai harian terbesar dan berpengaruh di Indonesia hingga tahun 1998 baru mempunyai 28 jurnalis perempuan dari 186 wartawannya. Seiring waktu, terjadi perkembangan dalam perekrutan jurnalis perempuan di Kompas, bahkan dalam rekrutmen yang belakangan justru perempuan lebih banyak diterima. Generasi pertama jurnalis

perempuan di Kompas yang terbit pada tanggal 28 juni 1965 ini adalah Trees Nio yang bergabung tahun 1966. Sampai tahun 1990 terdapat 14 jurnalis perempuan di Kompas. Menurut Budiarto Danudjaja, wartawan senior Kompas, tidak tampak kecenderungan model kerja yang seksis di Kompas (Siregar, 1999:60). Namun, tetap kental anggapan seterotipe tentang dikotomi terhadap bidang liputan lunak, seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, budaya dan hiburan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan liputan keras, seperti politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga. Stereotipe tentang bidang liputan lunak dan keras itu biasanya berujung pada penghargaan yang lebih besar bagi bidang liputan keras daripada liputan lunak. Selepas jatuhnya Orde Baru, Kompas mulai mendengarkan aspirasi dari kaum perempuan. Oleh karena itu, dalam 45 tahun terakhir adanya pelatihan jurnalistik Kompas memasukkan perspektif gender ke dalam bahan pelatihan. Jurnalis muda, baik perempuan maupun laki-laki kini juga berminat menulis isu perempuan, yang dulu menurut Ninuk M. P., cenderung dipandang sebelah mata oleh kebanyakan wartawan. Para jurnalis perempuan maupun laki-laki dapat menulis tentang perempuan tidak terbatas dan bisa di halaman manapun. Perubahan yang nyata juga terlihat pada pergantian kebijakan tunjangan. Saat ini, menurut Ninuk M. P., karyawan perempuan dapat memperoleh tunjangan penuh. Dulu tunjangan yang diterima perempuan hanya separuh karyawan pria. Kecuali perempuan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya janda dan tidak menikah lagi, ia baru bisa mendapat tunjangan penuh untuk anaknya.

Dalam relasi laki-laki dan perempuan, hegemoni yang terjadi bisa dianalisis pada dua arus utama, yaitu *ideologi patriarka* dan *ideologi pallocentrist*. Dalam masyarakat patriarka, perempuan selalu berada pada posisi yang ter subordinasi dalam kehidupan seksual. Perempuan harus memenuhi segala macam standar yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standar itu merupakan realitas objektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau objek dan subjek, dan perempuan ditempatkan sebagai objek dalam dunia laki-laki (*culture*) (Rosaldo, 1983:27-57). Dari sini, bisa diinterpretasikan bahwa laki-laki telah menegaskan dan melestarikan kekuasaan melalui berbagai instrumen, termasuk melalui seks. Dalam hal ini, seks tidak hanya untuk fungsi prokreatif, tetapi juga rekreatif yang memenuhi fungsi kesenangan dan kenikmatan yang merupakan gaya hidup hedonistik. Gaya ini, melalui kelas menengah, mampu memberikan inspirasi kepada kelompok masyarakat lain dalam membentuk suatu etos konsumeristik yang berorientasi pada pemuasan kesenangan, mengejar kepentingan dan kepuasan pribadi, dan mentransformasikan masyarakat yang berorientasi

pada pasar. Di dalam gerakan kebudayaan *leisure class* semacam ini, perempuan merupakan suatu produk yang dikonsumsi dan merupakan pemenuh kebutuhan laki-laki.

Dalam produk media, perempuan dicitrakan untuk menjadi pihak yang kalah atau selalu harus melayani dan memenuhi kebutuhan laki-laki dalam relasi. Laki-laki (superior) dicitrakan memiliki kontrol terhadap seksualitas kaum perempuan (inferior). Yang merupakan sumber dari penindasan perempuan adalah dasar dari patriarki yang mewarnai tatanan politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

### **Dua Ruang Jurnalis Perempuan**

Yang mempengaruhi sedikitnya jumlah jurnalis perempuan dalam pers Indonesia dan minat perempuan menjalani profesi wartawan adalah konstruksi sosial yang keliru tentang profesi jurnalis. Profesi wartawan selama ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan keras, membutuhkan mobilitas tinggi hingga 24 jam, pekerjaan yang membutuhkan dukungan rasionalitas yang tinggi. Yang dikatakan Rosihan Anwar (dalam Siregar, 1999:25) bahwa wartawan dalam pekerjaannya adalah bersikap oposisi terhadap kekuasaan, punya komitmen sosial yang tinggi, tahan menderita, berani keluar masuk penjara dan berani hidup miskin. Gambaran profesi tersebut dianggap pantas hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu laki-laki adalah makhluk manusia yang dianggap sanggup bekerja keras, berani menghadapi tantangan yang hidup-mati, tantangan penjara, dan dapat berpikir rasional serta punya komitmen sosial. Sementara perempuan dalam konstruksi sosial selama ini adalah makhluk manusia yang lemah, emosional, tidak tahan menderita dan menerima deraan tantangan. Oleh karena itu perempuan memang tidak cocok untuk memasuki profesi jurnalistik.

Secara struktural arus karir dan kedudukan serta peran jurnalis perempuan menjadi marjinal dalam struktur organisasi kerja redaksional pers. Berbagai peran strategis yang menentukan tentunya kemungkinan besar akan diraih oleh kelompok mayoritas atau dominan, yakni kaum laki-laki daripada kelompok minoritas, yakni kaum perempuan. Komposisi yang minoritas bagi jurnalis perempuan akan menempatkan mereka pada posisi yang marjinal dalam struktur kerja redaksional media. Nampaknya dalam realitas tersebut, berkembang sebuah pemahaman berkaitan dengan posisi perempuan yang sangat bias gender. Realitas yang merupakan abstraksi dari banyak hal, yang kemudian tanpa disadari telah terbakukan dalam sebuah formula publik yang sakral, yang dililit oleh sebuah tradisi ruang dan waktu. Menurut Bainar (dalam Priyo, 1999:131) bahwa posisi perempuan telah ditempatkan dalam realitas *second class*. Posisi yang membuat perempuan tersisih,

terkungkung dan tertutup peluangnya untuk bisa berkiprah dalam berbagai lini dan akses, oleh sangkar pemahaman bias gender.

Citra perempuan yang harus mampu mengatasi pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja mencari nafkah, peluang kesempatan pendidikan yang kebanyakan untuk laki-laki, serta pendidikan informal yang selalu dipompakan pada sektor domestik bagi kaum perempuan, merupakan ideologi gender yang telah mengakar lama pada masyarakat. Distribusi peran yang secara tidak sadar telah digariskan orang tua dan masyarakat kita. Stereotipe perempuan yang dibangun berdasarkan premis bahwa perempuan tidak asertif, tidak rasional dan tidak mampu memimpin ada kemungkinan gugur pada saat muncul sejumlah pekerja perempuan yang cemerlang, yang dikatakan Susilastuti (dalam Priyo, 1999:131). Dalam dunia media massa, orientasi jurnalis Indonesia yang cenderung patriakal, semakin memperkuat proses marjinalisasi perempuan jurnalis Indonesia. Persaingan yang cukup keras di dalam institusi media itu sendiri ataupun persaingan bisnis media secara keseluruhan.

Adanya tuntutan tanggung jawab penuh dari sosok jurnalis perempuan atas keharmonisan keluarga dan rumah tangganya, di sisi lain muncul semacam kesadaran bahwa sebagai jurnalis perempuan, ia mempunyai hak-hak yang sama untuk berkegiatan di masyarakat. Sjahrir (dalam Priyo, 1999:134), dua peran ini pun disadari sepenuhnya oleh editor dan pemimpin redaksi perempuan. Dalam pemikiran mereka, bagaimanapun kehidupan ekonomi rumahtangga memerlukan kontribusi dari kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki (suaminya). Kenyataannya bahwa jurnalis perempuan mendahulukan kesenangan dan kebahagiaan keluarga serta ketenangan lingkungan berisiko pada ancaman karir masa depan dan pendapatannya. Sebaliknya, risiko akan kehilangan cinta dan keluarga tumbuh pada saat berada pada titik nadir. Sementara untuk memasuki dunia maskulin seperti jurnalis ini harus mampu berpikir dan berstrategi maskulin. Dilakukan juga oleh jurnalis perempuan ketika sedang libur kerja, yaitu membawa suami dan anak-anaknya ke kantor atau tempat di mana mereka berugas, merupakan bagian dari keinginan jurnalis perempuan untuk mendekatkan keluarganya dengan sistem dan mekanisme kerjanya selama ini. Seperti yang dikatakan oleh Cahya Utama selaku Eksekutif Produser Program Infotainment RCTI yang dikutip (dalam Priyo, 1999:137), “sewaktu ditanya tentang kualitas pertemuan dengan keluarganya, maka mungkinkah peran jurnalis perempuan Indonesia sekarang ini tidak normal bagi ukuran keluarga Indonesia? ataukah justru merupakan bias pertanyaan yang bisa jadi juga bias persepsi masyarakat atas peran dan posisi jurnalis perempuan Indonesia saat ini. Kemudian Zsa Zsa Yusaryahya menjawab “*Just like a normal family .....*”

Dikalangan perempuan bekerja sendiri terbentuk apa yang lazim disebut sebagai *the development of dual roles* (melakukan dua peran). Pada periode ini rumah tangga (sektor privat) tidak lagi sebagai pusat kegiatan produksi, meskipun pekerjaan perempuan di rumah secara ekonomis masih tetap harus diperlukan. Bagi jurnalis perempuan, profesional merupakan sebuah penilaian atas sebuah kemampuan, yang dalam pandangan gender merupakan kesetaraan. Meskipun tak menutup kemungkinan munculnya pandangan mendua yang lebih condong kembalinya pandangan ke sektor privat. Sedangkan tuntutan kesetaraan dalam sektor publik, lebih kepada tuntutan sama-sama mendapatkan peluang beraktualisasi dalam pekerjaan dan profesi. Jurnalis perempuan dalam sektor ini mendapatkan kepuasan profesi atas apa yang telah dilakukannya. Kendati demikian, mereka tetap tidak melupakan sektor privat dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam porsinya di masyarakat, jurnalis perempuan senantiasa berhadapan dengan realitas sosial yang harus dihadapi sehari-hari. Rasa ketertarikan pada unit paling kecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Tempat di mana menjadi bagian dari keluarga inti, tempat yang terstereotipe menempatkan perempuan dalam posisi domestik. Sementara di sisi lain, harus berkompromi untuk menjalankan dua peran sebagai perempuan pada saat berkecimpung dalam dunia publik. Terlihat bahwa dua peran sebenarnya sudah sejak lama dilakukan kalangan jurnalis perempuan. Maka, sebuah kenyataan yang muncul di masyarakat bahwa pandangan para jurnalis perempuan sejak dulu hingga sekarang tetap tak berubah.

## **Simpulan**

Kekerasan yang mewujud dalam bentuk pembagian pekerjaan secara seksual yang membagi ranah publik untuk pekerjaan produktif bagi pria dan ranah domestik untuk pekerjaan reproduktif bagi wanita. Yang berakibat pada munculnya kekerasan psikologis yang mewujud dalam bentuk prasangka dan diskriminasi. Pembagian pekerjaan secara seksual yang mempunyai implikasi pada penghargaan material ini menempatkan wanita dalam posisi inferior. Proses dehumanisasi dalam wujud perendahan derajat wanita (objek cerita, lelucon, kekerasan fisik dan seksual, serta kriminalisasi seksualitas) dan dalam wujud pengangkatan derajat wanita (idealisisasi peran sosial wanita sebagai istri sempurna) sebagai alat pria untuk menundukkan wanita. Gender terkait dengan peneguhan stereotipe peran gender melalui media massa, eksklusi dan marginalisasi wanita dari narasi publik, serta dikotomisasi dunia publik-privat.

Memahami diskriminasi terhadap wanita sebagai setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan

untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan fisik dan seksual berimpitan dengan proses dehumanisasi wanita melalui perendahan derajat wanita karena menempatkan wanita sebagai objek lelucon, pemukulan, perkosaan, pembunuhan, dan kriminal sedangkan pengangkatan derajat wanita berimpitan dengan kekerasan alienatif yang menempatkan wanita dalam peran sosial sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Teori strukturasi membantu kaum wanita untuk mengenali selubung represif melalui *monitoring* tindakan reflektif terhadap tindakan mereka sendiri dan tindakan kaum pria yang menjadi partisipan dalam interaksi sosial. Dalam konteks media, kemampuan wanita untuk mengenali tindakan reproduksi struktur repressif di lingkungan kerjanya melalui *monitoring* tindakan reflektif interaksi sosial mereka akan mampu mengarahkannya untuk memproduksi struktur resistensif. Praktek rutinitas media sehari-hari yang telah menumpulkan kepekaan wanita terhadap kondisi represif di sekitarnya akan dapat disingkap dengan tindakan reflektif tersebut. Melalui rutinitas kegiatan media tersebut, wanita dapat melakukan tindakan resistensif melalui produksi isi media yang pada posisi relasi gender. Dengan cara mengeliminasi berbagai sisi kekerasan terhadap kaum perempuan.

Dari sisi perspektif gender, perjuangan seorang jurnalis perempuan untuk bisa bermitra sejajar dengan laki-laki adalah sebuah perjuangan profesionalitas yang masih belum sepenuhnya tercapai. Sekaligus menjadi awal bagi pembentukan tatanan atas rekonstruksi sebuah realitas sosial yang dibuat dengan sudut pandang perempuan. Dari paparan dia atas, menunjukkan bahwa ideologi patriarki memang masih mencengkram cara pandang para jurnalis perempuan Indonesia. Sehingga posisi yang ingin diraih pada sektor publik atau privat masih berada pada persimpangan. Tidaklah berlebihan, bila kunci semua itu kembali kepada kesadaran gender praktisi media itu sendiri. Kesadaran untuk tidak lagi menjadi berstatus rendah dalam lembaga, kesadaran untuk mengangkat isu perempuan sebagai isu mainstream sebagai tema yang senantiasa diangkat dalam media lazimnya, kesadaran untuk mengikis representasi perempuan dan depolitisasi perempuan, kesadaran bahwa bekerja adalah bagian dari hak-hak yang dipunyai perempuan, serta kesadaran untuk mengembangkan perspektif para jurnalis perempuan (perempuan dalam media massa) mengenai isu perempuan.

Akhirnya, apapun keluaran (*output*) yang dicetuskan dalam penanganan media, tetap tidak ada artinya bila akhirnya hanya dikonsumsi oleh perempuan yang kadangkala sudah

teryakinkan akan ketimpangan representasi terhadap kaumnya sendiri. Kesadaran praktek sebagai pekerja wanita mendorong tindakannya untuk menyediakan arena kompetisi yang adil bagi kedua jenis kelamin. Struktur gender terhadap wanita ini telah mampu menciptakan alternatif tindakan sosial di luar praktek sosial yang berlaku dengan tidak menerima begitu saja politisasi relasi gender yang membagi pekerjaan secara seksual. Konstruksi gender terhadap wanita dapat dilakukan apabila wanita-pria dengan kesadaran gender yang memadai untuk membuat praktek institusional yang bebas dari bias gender.

### **Referensi**

1. Perusahaan media dapat membuat kebijakan yang berperspektif gender. Hal ini berlaku bagi redaksi ataupun penulis berita dengan menciptakan lingkungan kerja yang sensitif gender
2. Perusahaan media dapat memberikan gaji dan tunjangan yang sama antara jurnalis. Kesempatan juga harus diberikan pada jurnalis perempuan
3. Perempuan yang melakukan tugas peliputan malam hari diberikan fasilitas pengamanan
4. Hak-hak kesehatan reproduksi, seperti cuti melahirkan dan menyusui harus diberikan/ disediakan. Selain itu juga menyediakan ruangan khusus (laktasi) bagi jurnalis perempuan yang menyusui
5. Rutinitas pendidikan kepada jurnalis seperti *training of gender*, pemahaman atas hak reproduksipun harus disediakan/ diberikan

### **Daftar Pustaka**

- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies. Teori dan Praktik*. Yogyakarta : PT. Bentang Pustaka
- Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse*, London: Edward Arnold
- Hery, Priyono, B. (2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Lan, May. (2002). *Pers, Negara dan perempuan; Releksi atas Praktik Jurnalisme Gender*. Yogyakarta : Yayasan Adhikarya IKAPI dan *The Ford Foundation*.
- Landes, Joan B. (1995). *The Public and the Private Sphere. A Feminist Reconsideration*. In *Johanna Meehan*. London : Routledge
- Naomi, Omi, I. (2003). *Wartawati, Herstory, Peran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mosco, Vincent. (2009). *The Political Economy of Communication*. 2nd.edition. London: Sage Publications

Priyo. (1999). *Wacana Gender dan Layar Televisi*. Yogyakarta : LP3Y.

Rosaldo, EZ. (1983). *Women, Culture and Society*. California: Stanford University Press

Shoemaker, Reese. (1995). *Mediating Message*, London: Routledge

Siregar, Ashadi, dkk. (1999). *Media dan Gender; Perspektif atas Industri Surat kabar Indonesia*. Yogyakarta : LP3Y

Subono, Nur Iman. (ed.). (2000). *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta : YJP.

Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan & Perempuan*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Sumber Lain:

Kode Etik Jurnalistik No.03 Tahun 2006

UU No. 40 Tahun 1999 – Tentang Pers

Internet:

Lubis, Uni. (2015). Dalam <http://unilubis.com/2015/03/10/jurnalis-perempuan-indonesia-bekerja-dua-kali-lebih-keras/html>. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 14.42 WIB

Workshop Jurnalistik Graha Sawunggaling Surabaya. (2010). Dalam <http://bapemaskb.surabaya.go.id>. Diunduh pada tanggal 8 Juni 2015 pukul 21.28 WIB

Tesis:

Rachman, Ace Sriati. (2004). *Konstruksi Realitas Perempuan Di Surat kabar Nasional. Suatu Analisis Framing Isu Kesetaraan Gender Pada Rubrik 'Swara' Harian Kompas Dalam Perspektif Konstruktivisme*. Jakarta. FISIP. UI